

Memadamkan Api, Mengikat Aspirasi: Penanganan Konflik Keagamaan di Kota Mataram

Akmal Salim Ruhana

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Email: akmalsalimruhana@gmail.com.

Diterima redaksi tanggal 4 Juli 2014, diseleksi 10 Juli 2014, dan direvisi 20 Agustus 2014

Abstract

As a multicultural and multi-religious country, Indonesia has the potential for the eruption of ethno-religious conflict. In some cases, ethno-religious conflict has already manifested. Conflict resolution can be carried out effectively or ineffectively.

This paper explores the process of conflict resolution between parties in Cakranegara, Mataram, where ethno-religious conflict between two regions identified as Sasak-Moslem and Bali-Hinduist was successfully resolved. Actors succeeded in solving the problem problem by widening the participation of stakeholders, accomodating aspirations, and strengthened the commitment to peace by a peace agreement. This qualitative research is also finds that factors such as a strong and egalitarian leadership, effective local wisdoms, and common commitment to peace supported the peace process. Factors that did not support the process included provocation by external actors and historical prejudices.

Keywords: Conflict Resolution, Commitment, Decree

Pendahuluan

Ada ungkapan, “di Bali, Anda tidak bisa melihat Lombok, tapi di Lombok Anda bisa melihat keduanya”. Ungkapan ini mungkin hendak menyatakan kesan pesona alam Pulau Lombok yang lebih indah dibanding Bali baik pantai-pantainya maupun kemolekan kotanya. Namun ternyata ada

Abstrak

Sebagai negara multikultural dan multi-agama, Indonesia memiliki potensi konflik suku dan agama. Beberapa potensi tersebut telah menjelma konflik terbuka. Setiap resolusi konflik pun telah dilakukan oleh banyak pihak secara efektif dan/atau sebaliknya. Tulisan ini mencoba menguraikan jenis penanganan yang dilakukan oleh banyak pihak di Cakranegara, Mataram, dalam menangani konflik suku dan agama antara dua daerah yang diidentifikasi sebagai Sasak-Muslim dan Hindu Bali. Mereka berhasil memecahkan masalah secara efektif dengan memperluas partisipasi para stakeholder, menampung aspirasi, dan mengikat komitmen perdamaian dalam perjanjian. Penelitian kualitatif ini juga menemukan faktor pendukung keberhasilan penanganan tersebut, yaitu: kepemimpinan yang kuat dan egaliter, kearifan lokal yang efektif, dan komitmen bersama untuk perdamaian. Sementara faktor penghambatnya adalah provokasi yang buruk dari luar, dan prasangka sejarah.

Kata Kunci: Penyelesaian Konflik, Komitmen, Perjanjian

pemaknaan yang lebih seadanya ketika berkeliling di seantero Kota Mataram di Pulau Lombok. Di kota Mataram banyak terdapat kampung-kampung Bali dengan jejeran pura dan sanggahnya. Tercium semerbak dupa dari bangunan-bangunan berornamen khas Bali di sana, seakan-akan kita sedang berada di Bali. Di wilayah lainnya, berdiri megah masjid-masjid dan

bangunan berornamen Islam lainnya. Hal ini menyadarkan kita sedang berada di Lombok yang dikenal dengan sebutan negeri seribu masjid. Di Kota Mataram terjadi perpaduan dan kontestasi dua budaya berlatar dua agama: Sasak Islam dan Hindu Bali.

Perpaduan harmonis Sasak Islam dan Hindu Bali ditunjukkan oleh berbaurnya warga berlatar etnis berbeda itu dalam kehidupan sehari-hari, di pasar-pasar dan ruang publik lainnya. Demikian juga, harmoni diindikasikan dengan berdampingannya berbagai simbol keagamaan dua kelompok warga, pura atau sanggah berdampingan dengan masjid atau mushala, di beberapa titik di dalam kota. Di sisi lain, dalam waktu bersamaan, aura kontestasi kedua kelompok memanglah tidak dapat dipungkiri. Tercium kesan kuat adanya kontestasi bahkan kompetisi simbol identitas di antara keduanya. Di ruang-ruang publik, seperti sekolah dan pasar, tampak gapura bergaya Bali bernuansa Hindu, dan/atau kaligrafi yang Islami yang saling menguasai. Simbol-simbol ini bukan sekadar aksesori estetis, melainkan mengandung makna filosofis: eksistensi yang saling mendominasi (Soeprapto, 2013).

Suku Sasak dan Suku Bali memang merupakan dua kelompok etnis terbesar di Lombok. Sasak sebagai penduduk asli merupakan etnis mayoritas Lombok, di samping etnis Samawa dan Mbojo. Kelompok etnis lain seperti Bali, Jawa, Bugis, Arab, dan Cina merupakan pendatang di sana. Orang Bali yang merupakan kelompok etnis terbesar kedua, tinggal di Kota Mataram dan Lombok Barat. Adapun orang-orang Sumbawa umumnya bermukim di Lombok Timur, orang-orang Arab di Ampenan, dan orang-orang Cina yang mayoritas merupakan pedagang tinggal di pusat-pusat pasar, seperti di wilayah

Ampenan dan Cakra. Keragaman etnis ini disertai pula keragaman bahasa, budaya, dan agama (Monografi NTB, 1977; Muslim, 1999).

Menyimak profil dan konfigurasi dua kelompok mayoritas di Kota Mataram, yakni suku Sasak yang Islam dan suku Bali yang Hindu, dapatlah dipahami jika kontestasi, kompetisi, gesekan, atau bahkan konflik kerap terjadi di antara mereka. Unsur etnis dan agama memang kerap kali berkelindan dan memiliki afinitas yang sulit dipisahkan. Orang Sasak hampir pasti Islam, dan orang Bali hampir pasti Hindu. Sejarah juga mencatat, beberapa konflik komunal di Indonesia terjadi dengan melibatkan unsur etnis dan agama, meski kedua unsur ini kerap kali muncul kemudian. Unsur agama kerap kali terlibat kemudian dalam suatu kejadian konflik, misalnya dalam kasus Konflik Maluku dan Poso. Menurut Atho, semua pimpinan Majelis Agama di tingkat pusat mengatakan bahwa konflik Maluku bukanlah konflik agama melainkan karena perebutan kekuasaan lokal dan sumber daya yang terbatas, tetapi dalam perkembangannya melibatkan anggota masyarakat berdasarkan garis-garis penganutan agama. Demikian juga konflik Poso yang berakar pada perebutan kekuasaan lokal dan sumber-sumber daya, dalam perkembangannya melibatkan orang berdasarkan perbedaan agama (Atho Mudzhar, 2013: 44).

Percekcokan antara dua pedagang, misalnya, tak jarang kemudian bergeser ke konflik komunal antar etnis dan antar agama. Kasus berlatar ekonomi itu, membawa-bawa sentimen agama sebagai pemerkuat dan pemercepat gerakan massa. Bandingkan dengan Williem Vendley yang bahkan menyebut konflik kekerasan telah menjadi sinonim dengan konflik agama dan bukan sekadar pemerkuat atau pemercepat. Lindey juga mencontohkan pada peristiwa lain

seperti konflik-konflik berkepanjangan seperti Yahudi dan Muslim di Palestina, Budhis dan Hindu di Srilanka, Hindu dan Muslim di India, Muslim dan Kristen di Nigeria, "Barat" Judeo-Kristen dan Muslim ekstrimis serta banyak kasus kekerasan lain yang menggunakan nama agama (Elza Peldi Taher, ed., 2009: 698; Suprpto, 2013: 2).

Hubungan panas-dingin antara Islam-Sasak dan Hindu-Bali memang sudah sering terjadi bahkan menyejarah di Kota Mataram. Telah terjadi banyak kasus gesekan antara kedua kelompok ini di Mataram, sejak lama, bahkan sejak sejarah pembentukan wilayah ini. menurut Suprpto:

"Secara historis, kehadiran komunitas Bali-Hindu di Lombok berlangsung dalam moda penguasaan atau penjajahan. Keberadaan Kerajaan Bali-Hindu yang pernah lama memerintah Lombok dan meneguhkan kekuasaannya di Kota Mataram merupakan bentuk penjajahan. Bahkan penjajahan yang dilakukan Kerajaan Hindu tersebut berlangsung lebih lama dibanding penjajahan Belanda. Memori kolektif ini masih ada di sebagian besar masyarakat Sasak dan sering menguat terutama dalam kondisi konflik dan pasca konflik. Penguatan ini semakin nampak terutama pada komunitas yang pola permukimannya tersegregasi secara etnis dan agama." (Suprpto, 2013: 329).

Kasus gesekan hingga konflik yang meminta korban muncul-tenggelam dalam dinamika masyarakat heterogen yang terus berubah. Upaya penanganan konflik dan pemeliharaan kerukunan juga telah banyak dilakukan, baik oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat. Pemerintah dan aparat keamanan melakukan tindakan penghentian pada tahap konflik terbuka, dan upaya pemulihan serta rekonsiliasi setelahnya. Sedangkan umat beragama

dan masyarakat sipil melakukan penanganan konflik antar umat beragama dalam bermacam bentuknya, pada pra ataupun pasca konflik.

Sayangnya, sejauh ini sejumlah upaya penanganan pascakonflik kerap kali terkesan tidak tuntas. Selain ditengarai masih bersifat parsial dan dilakukan masing-masing, belum terintegrasi secara komprehensif-berkelanjutan, pendekatan dan metode yang dilakukan pun belum cukup variatif dan menjawab kebutuhan lapangan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pengayaan metode-metode dan bentuk-bentuk pendekatan dalam penanganan konflik keagamaan di berbagai komunitas dan oleh berbagai pihak.

Persis pada posisi itu penelitian ini hendak dilakukan. Penelitian yang mengambil lokus Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB, ini hendak melihat praktik penanganan konflik keagamaan oleh para pihak, untuk melihat pendekatan dan tingkat efektivitasnya, sekaligus untuk memperkaya metode yang selama ini diterapkan. Metode dialog atau workshop dengan pelibatan dua-pihak yang pernah berkonflik, misalnya, perlu diperkaya dengan cara-cara lain yang lebih mendorong pada ketercapaian tujuan jangka panjang rekonsiliasi-permanen. Diketahui, sejumlah kelompok pegiat kerukunan dan resolusi konflik di sejumlah daerah memiliki cara-cara penanganan konflik keagamaan yang, dalam satu dan lain hal, mungkin dapat diujiterapkan pada kasus serupa di tempat lain.

Berdasarkan pemikiran di atas, penelitian ini hendak mengkaji "bagaimana penanganan konflik bernuansa keagamaan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam kasus konflik keagamaan di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram." Untuk memahami permasalahan tersebut, dapat diajukan beberapa pertanyaan

penelitian: (1) Bagaimana gambaran pendekatan penanganan konflik keagamaan yang dilakukan?; (2) Bagaimana keberhasilan penanganan tersebut, dan apa saja indikatornya?; serta (3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan metode penanganan tersebut?

Selain bertujuan untuk mendeskripsikan pendekatan penanganan konflik keagamaan yang dilakukan, juga hendak mengetahui indikator-indikator keberhasilan penanganan tersebut. Selain itu, berupaya mengeksplorasi faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan metode penanganan konflik keagamaan dimaksud.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Kementerian Agama dalam pengayaan pola/metode pendekatan dalam penanganan kasus konflik keagamaan yang lebih efektif, dan mendukung ke arah penuntasan penanganannya. Selain itu, informasi hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah, pegiat kerukunan, serta masyarakat pada umumnya sebagai piranti pembantu dalam proses-proses pemeliharaan kerukunan antarumat beragama.

Telah banyak penelitian dan kajian yang berfokus pada upaya penanganan atau resolusi konflik. Di antaranya dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Puslitbang ini pada tahun 2009 dan 2010 melakukan kajian yang difokuskan pada upaya membangun kedamaian (*peace making*) masing-masing di enam lokasi. Kajian ini berhasil mengidentifikasi akar konflik etno-religius antara lain, bahwa gejala konflik musiman seringkali menjadi fenomena populer di tengah masyarakat Indonesia yang multikultur. Hampir semua konflik yang terjadi pada seluruh wilayah kajian memiliki konsistensi penyebab yang sama dengan konflik-konflik sebelumnya, yaitu: akibat

kemiskinan, perebutan sumber ekonomi, desain tata ruang kota atau wilayah yang tidak beraturan, dominasi suatu etnis, kebijakan publik yang menguntungkan golongan atau pihak tertentu, dan kontrol sosial masyarakat yang lemah hingga mengerucut pada provokasi kelompok-kelompok oportunistis. Namun konflik tersebut berhasil diredam sehingga tidak muncul kembali tindak anarkis, kekerasan dan pengrusakan, sekalipun ada yang masih berpotensi konflik. Pada tahun 2011 kajian kembali dilakukan dengan berfokus pada pemeliharaan kedamaian (*peace building*) di empat lokasi, yakni: Medan, Manado, Bali, dan Yogyakarta. Ditemukan, meski keempat wilayah ini dikenal damai namun tidak berarti kebal terhadap konflik, potensi konflik sebesar apapun pasti ada pada setiap komunitas masyarakat beragama. Konflik horizontal bernuansa etno-religius di Indonesia tidak jarang kembali muncul setelah sekian lama stabil atau damai.

Dari pengamatan dan kajian Yusuf Asry, dkk. (2013), program *peacemaking* dan *peacekeeping* telah cukup berhasil setidaknya pada tahap penyadaran kedamaian. Hanya saja, masih harus menanti untuk melihat sejauhmana efektivitasnya pada tahapan praktik para kader perdamaian peserta program ini dalam penanganan kasus yang terjadi di daerah masing-masing. Penerapan pendekatan Participatory Action Research memang meniscayakan waktu yang lama dan pengulangan.

Kajian lain dilakukan oleh Ihsan Ali Fauzi, dkk. (2009) dengan tajuk "Pola-Pola Konflik Keagamaan di Indonesia" (1990-2008). Kajian yang dilakukan oleh Yayasan Waqaf Paramadina (YWP) bekerjasama dengan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK-UGM), The Asia Foundation (TAF) ini antara lain menemukan bahwa dari segi tingkat insiden, dua pertiga

dari konflik keagamaan di Indonesia mengambil bentuk aksi-aksi damai, dan hanya sepertiganya yang berbentuk aksi-aksi kekerasan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kapasitas untuk mewujudkan respons mereka terhadap konflik keagamaan dalam bentuk aksi-aksi damai. Dari hasil penelitian ini, proses penanganan konflik sesungguhnya dapat dilakukan dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola konflik oleh mereka sendiri.

Distingsi penelitian kali ini ialah pada deskripsi mendalam terkait penanganan konflik keagamaan yang dinilai sukses, mengidentifikasi tingkat efektivitasnya, dan merumuskan pola penanganannya sehingga siap diujiterap. Sebuah pengembangan dari program *peace making* dan *peace keeping* 2010-2011, dan kajian sebelumnya.

Sebagaimana akan terlihat kemudian, dalam menjelaskan “penanganan” akan digunakan beberapa teori mengenai resolusi konflik. Kasus yang dapat dikategorikan sebagai telah melalui masa titik kulminasi *open conflict*, melibatkan kekerasan bahkan korban jiwa ini, diasumsikan telah selesai pada tahap hingga penelitian ini dilakukan: penandatanganan kesepakatan damai. Mencapai deeskalasi dan tidak meningkat kembali. Berangkat dari asumsi (dan pembatasan) ini, maka kriteria keberhasilan penanganan akan dapat ditentukan.

Beberapa teori resolusi konflik yang dipinjam untuk melihat proses penanganan kasus ini adalah teori intervensi konflik. Christopher W. Moore (1996) menjelaskan bahwa intervensi berarti masuk ke dalam sistem hubungan yang sedang berlangsung, melakukan kontak di antara dua pihak atau beberapa pihak, untuk membantu mereka.

Metodologi Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini mengumpulkan data dengan studi kepustakaan/dokumentasi, wawancara, dan pengamatan lapangan (observasi). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan referensi terkait, baik berupa buku, dokumen kebijakan/regulasi, maupun informasi dari dunia maya. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan kunci di Kota Mataram, NTB, antara lain adalah: pejabat pada Kantor Kementerian Agama dan Kesbangpol Linmas, FKUB, lembaga keagamaan, camat, lurah, serta beberapa aktivis pegiat kerukunan. Sedangkan observasi dilakukan langsung ke titik-titik penting yang mendukung penelitian ini, bersamaan dengan proses wawancara.

Data kemudian dianalisis secara deskriptif-analitik, melalui tahap-tahap editing, klasifikasi data, reduksi data, dan interpretasi untuk memperoleh kesimpulan. Interpretasi data dalam upaya analisis dilakukan dengan bantuan teori sosial terkait. Untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi dengan cara pemeriksaan melalui sumber-sumber lain. Menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong, 1987) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat keterpercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi misalnya dilakukan dengan mengecek data/informasi tertulis dengan wawancara, ataupun mengecek suatu informasi dari pihak tertentu dengan informan lainnya.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Alasan pemilihannya karena pernah terjadi beberapa kali kasus konflik etno-religijs dan secara demografi menunjukkan adanya komunitas Sasak-

Islam dan Bali-Hindu dengan segregasi yang cukup kentara. Lingkungan Tohpati dihuni mayoritas Suku Bali-Hindu, dan Lingkungan Karang Mas Mas dan Pandan Salas mayoritas Suku Sasak-Muslim. Pengumpulan data dilakukan selama 16 hari, yakni pada tahap penjajakan lima hari, dan dilanjutkan pengumpulan data pada tanggal 4-14 September 2013.

Potensi Konflik Kota Mataram

Kota Mataram adalah ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari sepuluh kabupaten/kota, yakni: Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. KSB, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu, Kota Bima, dan Kab. Bima.

Secara demografis, menurut data pada Kanwil Kementerian Agama NTB, di Kota Mataram ada 388.900 orang muslim, 12.760 orang Kristen, 5.760 orang Katolik, 68.242 orang Hindu, dan 7.680 orang Buddha. Meski diduga terdapat pemeluk agama Khonghucu sebagaimana terlihat pada keberadaan kelenteng, tidak ada data yang memadai pada instansi-instansi Pemerintah tentang hal ini. Sedangkan jumlah rumah ibadat, ada 251 masjid, 12 gereja Kristen, 3 gereja Katolik, 132 pura, 11 vihara, dan 1 buah kelenteng.

Adapun Cakranegara, lokus kajian ini, adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kota Mataram, yang memiliki luas wilayah sekitar 16,40 km.² Secara administratif, kecamatan ini terbagi atas 9 kelurahan, 99 lingkungan, 156 RW dan 471 RT. Berdasarkan data BPS tahun 2009, jumlah penduduk Cakranegara tercatat 60.333 jiwa. Jumlah tersebut merupakan jumlah penduduk terbanyak keempat dari 6 kecamatan yang ada di Mataram. Penduduk di kecamatan ini hampir merata

di setiap kelurahan dengan penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, kemudian disusul dengan Kelurahan Sayang-Sayang, dan Kelurahan Cakranegara Timur yang memiliki penduduk paling sedikit. Wilayah yang paling padat adalah Kelurahan Cakranegara Selatan Baru.

Sementara itu, berdasarkan data BPS tahun 2010, penduduk Kecamatan Cakranegara mayoritas beragama Islam (49,59%), yang sebagian besar adalah penduduk asli pulau Lombok, yaitu suku Sasak, dan juga beberapa suku asli di wilayah Nusa Tenggara Barat, yakni dari Sumbawa, Dompu, dan Bima (Mbojo). Lalu pada urutan kedua (44,03%), penganut agama Hindu, lalu pemeluk Kristen dan Katolik (2,93%) serta Budha dan lainnya (3,45%). Untuk menunjang kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya tempat ibadat, tersedia masjid 49 buah dan mushola 51 buah, pura 62 buah, gereja 4 buah, dan vihara 1 buah. Sebagai kecamatan dengan latar historis dan fakta demografis yang menunjukkan "keseimbangan kekuatan" Islam-Sasak dan Bali-Hindu, Cakranegara cukup menarik dikaji hubungan antar umat beragamanya.

Di tengah kemolekan alam dan harmoni budaya masyarakat Lombok, Kota Mataram, ternyata memendam potensi konflik yang cukup besar. Meski potensi konflik itu dapat ditemukenali sebelumnya, namun semakin yakin ketika konfliknya telah memanifes. Dalam amatan kajian yang ada, setidaknya sejak 1980-an telah terjadi gesekan dan konflik sosial keagamaan (*ethno-religious conflict*) di Kota Mataram, termasuk di dalamnya Kecamatan Cakranegara. Di bawah ini secara kronologis catatan tentang rangkaian konflik sosial keagamaan yang pernah terjadi di Kota Mataram dan

sekitarnya yang disusun dari berbagai sumber informasi, antara lain: Israil dkk., 2004: 1-16; Suprpto, 2013; *Slide* paparan Walikota Mataram pada Pertemuan

Terbatas dengan Wantimpres terkait Model Penanganan Konflik Sosial Berlatar Belakang Agama di Kota Mataram, 26 Juli 2013).

Tabel 1

Peristiwa Konflik Sosial Keagamaan di Kota Mataram dan sekitarnya

No	Waktu	Keterangan	Para Pihak
1	1980	Terjadi <i>mesiat</i> (perang) yang melibatkan komunitas Hindu dari kampung Tohpati dan Sindu, dengan Muslim dari Karang Taliwang, yang antara lain disebabkan persoalan pendirian tempat ibadat yang saling berdekatan. Pembangunan masjid yang berdekatan dengan pura, sementara pura telah lama berdiri.	Warga Karang Taliwang dengan Sindu dan Tohpati
2	2000	Warga Bali di Tohpati yang sedang merayakan Nyepi yang merasa terganggu oleh suara pembacaan <i>sholawat</i> dalam kegiatan <i>selakaran</i> . Meski sempat menegang, konflik dapat segera dikendalikan sehingga tidak meluas menjadi kerusuhan terbuka.	Warga Tohpati dan warga sekitarnya
3	2001	Terjadi bentrok warga muslim Nyangget dengan Kampung Saksari yang Hindu. Kedua kampung ini terletak di sebelah timur Karang Taliwang. Pemicunya adalah perkelahian antar pemuda yang sedang dalam keadaan mabuk.	Warga Nyangget dengan Saksari
4	2003-2005	Konflik terjadi antara warga masyarakat Petemon dan Karang Genteng Kelurahan Pagutan Kecamatan Ampenan, yang masih mempunyai hubungan keluarga/kerabat, suku/etnis, dan agama yang sama (Islam). Persoalan dipicu oleh batas tanah pekuburuan (luas batas wilayah).	Warga masyarakat Petemon dan Karang Genteng
5	2006	Ecudus warga jamaah Ahmadiyah yang mengalami kekerasan, berasal dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat yang ditampung di Asrama Transito Majeluk, Kecamatan Mataram. Hingga kini belum ada penyelesaian yang tuntas	Warga Jemaat Ahmadiyah dan masyarakat
6	2008	Konflik antar warga lingkungan <i>Sindu</i> (Bali, Hindu) dengan warga lingkungan <i>Nyaget</i> (sasak/Islam). Konflik ini menimbulkan 1 korban jiwa/meninggal dunia dan 3 orang luka-luka	Warga Lk. Sindu dan Lk. Nyaget
7	2011	Perkelahian antar pemuda yang berujung bentrok antar Warga Lingkungan Karang Bagu dan Warga Lingkungan Karang Taliwang, Kec. Cakranegara. Kedua pihak yang bertikai sama-sama bersuku Sasak dan beragama Islam. Tidak terdapat korban jiwa, hanya luka-luka	Warga Karang Bagu dan Karang Taliwang
8	Desember 2012	Perselisihan antara pemuda yang dipengaruhi oleh minuman keras, antara Warga Lingkungan Tohpati (Bali, Hindu) dengan Warga Lingkungan Karang Mas-Mas (Sasak/Islam) di wilayah Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara. Perselisihan berubah menjadi bentrok massa kedua lingkungan yang menimbulkan satu orang korban jiwa berasal dari Kelurahan Karang Mas-Mas	Warga Tohpati dan Karang Mas-Mas

9	Maret 2013	Bentrok kedua (lanjutan) antara pemuda warga Lingkungan <i>Tohpati</i> dengan pemuda Warga Lingkungan <i>Karang Mas-Mas</i> , Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara. Kali ini korban jiwa meninggal dunia dari pemuda Lingkungan <i>Tohpati</i> .	Warga Tohpati dan Karang Mas-Mas (lanjutan)
10	Juni 2013	Perkelahian antar pemuda dari Lingkungan <i>Pandas Salas</i> Kelurahan Mayura dengan pemuda dari Lingkungan <i>Tohpati</i> Kelurahan Cakra Utara, yang membias sehingga melibatkan warga kedua lingkungan yang beragama Hindu/Bali dan Islam/Sasak. Terdapat korban luka-luka dan kerusakan ringan rumah ibadah.	Warga Tohpati dan Pandan Salas
11	Mei 2013	Terjadi perselisihan antara warga Lingkungan Penjarakan Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan, dengan sekelompok orang penganut aliran Salafi/Wahabi, dimana warga masyarakat lingkungan Penjarakan menolak aktivitas pengikut jama'ah ini.	Warga Pejarakan dan penganut aliran Salafi/Wahabi

Dari rentetan catatan konflik keagamaan di atas, penulis akan memfokuskan pada butir 8, 9, dan 10, yakni terkait kasus gesekan warga Tohpati dan Karang Mas Mas (Desember 2012 dan Maret 2013), serta kasus gesekan warga Tohpati dengan Pandan Salas (Juni 2013). Keduanya kasus etnoreligius antara Muslim-Sasak dan Hindu-Bali.

Kronologi Kasus Konflik

Kasus pertama, bermula pada Desember 2012 terjadi kesalahpahaman dan perkelahian antar dua pemuda di depan sebuah toko waralaba. Adalah A, anak dari Bapak S, (warga Lingkungan Karang Mas Mas, suku Sasak, beragama Islam) telah berkelahi dengan B, anak dari Bapak I Wayan S (warga Lingkungan Tohpati, suku Bali, beragama Hindu). Dikabarkan penyebabnya hanya karena salah seorang di antara mereka merasa tersinggung dengan sorot mata yang dianggapnya menantang. Setelah saling berkata-kata menantang, mereka lalu berkelahi di lapangan terdekat, dan akhirnya dilerai kawan-kawannya yang ada disana. Lalu, mereka pulang kembali ke lingkungannya masing-masing. Mendapat cerita dari pemuda B, kelompok pemuda di Tohpati timbul

solidaritasnya dan kemudian menyerang kelompok pemuda Kampung Karang Mas Mas. Bentrok dan perkelahian massal tak terhindarkan, dan pada akhirnya menyebabkan seorang warga Karang Mas Mas meninggal dunia, terkena senjata tajam. Aparat dan keamanan turun menghentikan kisruh massa, dan berhasil meredam dan menghentikan adu kekuatan ini.

Setelah kasus itu, kedua kelompok senantiasa saling waswas dan waspada, kalau-kalau akan ada serangan susulan. Dan sesekali memang terjadi kondisi memanas. Hingga pada Maret 2013 terjadilah bentrok antarwarga kedua lingkungan yang menyebabkan meninggalnya salahsorang warga Lingkungan Tohpati, yang kebetulan sang adik dari B. Mungkin karena sudah merasa seimbang, korban mati masing-masing satu orang, kondisi pertentangan mulai mengendur. Upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan aparat sejak kasus pertama mulai menemukan harapan penyelesaian.

Adapun kasus kedua, nyaris serupa, kasus perselisihan warga Lingkungan Pandan Salas dan Tohpati ini pada mulanya terjadi karena adanya cekcok dua pemuda pada 24 Juni 2013. Adalah Az (seorang pelajar, 17 tahun, warga

pandan Salas, beragama Islam) cekcok berselisih paham dengan Ida Bagus WA (pegawai swasta, 22 tahun, warga Tohpati, beragama Hindu) di Jalan Hasanuddin, Cakranegara, Mataram. Cekcok itu sendiri dikabarkan hanya disebabkan masalah gengsi anak muda, hebat-hebatan. Cekcok mulut yang kemudian sempat saling pukul bisa dilerai kawan-kawannya. Namun kemudian, efek-rambat informasi yang salah dan sebetuk *prejudice* telah cukup mengonsolidasikan warga di kedua lingkungan. Maka terjadilah perselisihan antar warga kedua lingkungan, yang kebetulan tersegregasi dan memiliki identitas etnorelijius yang berbeda. Warga Pandan Salas yang mayoritas beragama muslim dengan warga Tohpati yang mayoritas beragama Hindu (Wawancara dengan KT, Kasi Intelkam Polsekta Cakranegara, pada 26 Juli 2013; Berkas Surat Perjanjian Perdamaian (Acte van Dading) antara Keluarga Bapak MA dengan Keluarga Ibu JW; Berkas Kesepakatan Bersama antara Warga Lingkungan Pandan Salas Kelurahan Mayura dengan Warga Lingkungan Tohpati Kelurahan Cakra Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, 8 Juli 2013).

Tidak terjadi korban jiwa dalam bentrokan tersebut, selain kerusakan sarana lingkungan dan luka psikologis di kedua pihak. Demikianlah, kedua kasus dipicu dan disebabkan kasus 'kenakalan' pemuda yang berkelahi dan kebetulan sedang dalam keadaan mabuk. Hal itu kemudian memobilisir emosi dan solidaritas kawan seidentitas (kampung, suku, agama) dan dibekali *prejudice* sisa-sisa sejarah lama hubungan kalam kedua etnis terbesar di Lombok ini.

Pihak-pihak yang terlibat pada mulanya hanyalah kalangan muda yang secara psikologis masih labil, suka jago-jagoan, hebat-hebatan, dan kerap kurang bisa mengendalikan emosi. Namun kemudian pihak lain ikut terlibat, termasuk kalangan tua, atas nama solidaritas

kesukuan dan agama. Korban materi dan bahkan jiwa masing-masing satu dari kedua pihak (pada kasus pertama), serta luka psikologis di kedua pihak, menjadi korban dari konflik ini. Sejak lama dan selama ini sebenarnya mereka baik-baik, dapat hidup rukun bersama, apalagi berada bersama dalam satu wilayah yang meski tersegregasi namun berdampingan dalam satu wilayah.

Penanganan Konflik

Tidak lama setelah kasus pertama terjadi, pada 27 Desember 2012, segenap kalangan Pemerintah setempat melakukan langkah penanganan. Misalnya, Camat Cakranegara dan masing-masing lurah kedua pihak berupaya menenangkan massanya, menahan jangan sampai terjadi bentrokan lagi. Namun demikian, upaya ini belum mendapat respon baik masyarakat yang lebih terdorong emosinya untuk melakukan serangan-serangan balasan atas geliat pihak lainnya. Tidak jarang, hanya karena terdengar suara ramai di pihak lain, lalu ada SMS gelap yang memprovokasi mereka, lalu mereka mempersiapkan perlawanan. Suasana malam di kedua lingkungan kerap kali mencekam. Di antara penanganan juga adalah dibangunnya tembok pemisah antara Lingkungan Karang Mas Mas dan Lingkungan Tohpati. Hal ini dimaksudkan Pemerintah untuk mengurangi kesalahpahaman diantara kedua pihak.

Setelah sekian kali terjadi bentrokan, pada 7 Maret 2013 terjadi bentrokan yang lumayan besar dan hingga menewaskan satu orang di pihak Lingkungan Tohpati. Aparat keamanan melakukan penanganan dengan memblokir jalan kedua lingkungan. Yang menarik, pascatewasnya korban di kedua pihak ini, terjadi suasana *cooling down* di kedua pihak. Hubungan tegang antara lingkungan Karang Mas Mas dan Tohpati mulai mengendur. Upaya

penanganan pun lebih mendapat jalan ke arah kesepakatan damai. Puncaknya, setelah melalui tahap-demi-tahap mediasi ke arah rekonsiliasi, pada 20 April 2013 terlaksana penandatanganan “Surat perjanjian Perdamaian” antara kedua pihak bertikai bersama keluarganya masing-masing, dan sekaligus penandatanganan “Kesepakatan Bersama” antara warga masyarakat Lingkungan Karang Mas Mas dan Lingkungan Tohpati. Hingga saat itu, pertentangan kedua pihak dianggap selesai. Penanganan dianggap telah berhasil.

Adapun dalam kasus kedua, ketika bentrok terjadi pada Selasa, 25 Juni 2013, Pukul 18.00 WITA, Camat Cakranegara yang baru pagi harinya dilantik yaitu M. Salman Rusdi, S.Ip, pengganti camat terdahulu yakni Ahsanul K malam itu langsung turun ke lokasi melakukan penanganan. Dia langsung berkoordinasi dengan lurah-lurah di bawah kendalinya, yang *notabene* belum ia kenali karena belum pernah bertemu dan berkomunikasi, kecuali seorang lurah, yakni Lurah Mayura, tempat terjadinya konflik malam itu. Camat yang ingin terjun langsung ke lokasi, disarankan para lurahnya untuk tidak ke lokasi terlebih dahulu, karena masyarakat belum mengenalnya, sehingga dikhawatirkan Camat akan dianggap provokator dari luar. Maka koordinasi dilakukan melalui telepon, baik kepada aparat keamanan, aparat pemerintah setempat, dan tokoh-tokoh penting yang ia percayai. Salah satu tokoh itu adalah Bapak H. Chasbah, seorang pemuka adat yang dihormati masyarakat dan kebetulan pernah menjadi dosennya di Universitas 1945 di mana kampus tersebut berada tidak jauh dari titik konflik. Camat pada intinya meminta bantuan beliau untuk memediasi para pihak yang berkonflik.

Pada Jumat, 28 Juni, 2013 selepas sholat Jumat, dilaksanakan rapat khusus terbatas di Pendopo Walikota

dipimpin oleh Walikota Mataram, terkait penyelesaian kasus di atas. Rapat ini dihadiri oleh Walikota Mataram (pimpinan rapat), dua orang utusan Kapolda NTB, Asisten II Mataram, Kepala Badan Kesbangpol Kota Mataram, Kepala Satpol PP Binmas Polres Mataram, Camat Cakranegara, Kapolsek Cakranegara, Danramil Cakranegara, Lurah Cakra Utara, dan Lurah Mayura. Kesimpulan rapat ini, Walikota memerintahkan Kaban Kesbangpol bersama Camat dan aparat keamanan terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan pertikaian tersebut, dengan melibatkan civitas akademika Universitas 45 Mataram dalam melakukan mediasi kepada masyarakat di kedua belah pihak.

Kemudian, pada hari itu juga, pukul 20.00 WITA, langsung diadakan pertemuan bertempat di Hotel Santika Mataram. Peserta rapat berjumlah 20 orang, terdiri atas: Utusan Polda NTB, Rektor Univ 45 Mataram yang diwakili oleh Sekretaris Rektor Drs. H. Chasbah, Staf Ahli Walikota Mataram, Kaban Kesbangpol Kota Mataram, Ketua FKUB Mataram, Camat Cakranegara, Kapolsek Cakranegara, Danramil Cakranegara, Binmas Polres Mataram, Lurah Cakra Utara, Lurah Mayura, dan dua orang tokoh masyarakat dari kedua lingkungan. Mereka membahas langkah-langkah persiapan penanganan konflik yang terjadi antara warga Tohpati dan Pandan Salas tersebut. Kesimpulan rapat antara lain, akan segera diadakan pertemuan mediasi yang pertama dan seterusnya bertempat di Bale Sangkep Universitas 45 Mataram dan tempat-tempat lainnya yang disepakati oleh Tim Penanganan Konflik yang telah ditugaskan oleh Walikota Mataram.

Mediasi pertama pun dilaksanakan. Pada Senin, 1 Juli 2013, pukul 17.00 WIT diadakan pertemuan Mediasi I yang bertempat di Bale Sangkep Universitas 45 Mataram. Pertemuan ini khusus antara

Tim dengan pihak Lingkungan Tohpati yang dihadiri oleh pihak yang bertikai, sdr. Ida Bagus WA yang didampingi keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan warga terkait, dan dari tim penanganan konflik. Jumlah peserta pertemuan ini mencapai 65 orang, yakni terdiri atas: Sdr. Ida Bagus WA, didampingi keluarga dan masyarakat, Sekretaris Rektor Universitas 45 yakni Drs. H. Chasbah bersama civitas akademika, Kepala Badan Kesbangpol Kota Mataram Drs. H. Bondan Wisnujati, SH, Ketua FKUB dan 2 orang anggotanya, Kabid Wasnas Bakesbangpol Kota Mataram, dua orang utusan Polda NTB, Binmas Polres Mataram, Kapolres Cakranegara, Binmas Cakra Utara, Danramil Cakranegara, Babinsa Cakra Utara, Camat Cakranegara, Lurah Cakra Utara, unsur Kominda Kota Mataram, dan Kepala Lingkungan Tohpati. Dalam pertemuan ini ditanyakan kepada pihak Tohpati, apa saja aspirasi yang dikehendaki. Selain itu, posisi-posisi yang seharusnya dilakukan oleh pihak Tohpati. Dari pertemuan Mediasi I ini, tim cukup jelas menangkap harapan damai dari pihak Tohpati.

Selanjutnya, pada Rabu, 3 Juli 2013 pukul 16.30 WITA, tim mengadakan pertemuan mediasi II bertempat di Bale Sangkep Universitas 45 Mataram. Kali ini khusus untuk Lingkungan Pandan Salas, Kelurahan Mayura, yang dihadiri oleh pihak yang bertikai, sdr. Az, yang didampingi oleh orang tua dan keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan kepala lingkungan kelurahan Pandan Salas. Jumlah peserta pertemuan adalah 40 orang yang terdiri atas: Sdr Az didampingi keluarga dan masyarakat, Sekretaris Rektor Universitas 45 Drs. H. Chasbah bersama civitas akademika, KaBadan Kesbangpol Kota Mataram, Ketua FKUB dan 2 orang anggota, Kabid Wasnas Bakesbangpol Kota Mataram, dua orang utusan Polda

NTB, Binmas Polres Mataram, Kapolsek Cakranegara, Binmas Kelurahan Mayura, Danramil Cakranegara, Babinsa Mayura, Camat Cakranegara, Lurah Mayura, unsur Kominda Mataram, dan Kepala Lingkungan Mayura. Hal serupa ditanyakan dan diminta ke pihak Lingkungan Tohpati, kali ini diberikan kesempatan ke pihak Lingkungan Pandan Salas. Hasilnya pun serupa, ada itikad kuat untuk menyelesaikan masalah dan memilih damai.

Selanjutnya, tim terus beraktivitas. Pada Rabu, 3 Juli 2013, malam hari pukul 19.00 WITA, Tim mengadakan rapat penanganan konflik, yang bertempat di ruang rapat Rektor Univ. 45 Mataram. Jumlah peserta rapat adalah 15 orang yaitu: Sekretaris Rektor Universitas 45, Drs. H. Chasbah bersama civitas akademika, Kaban Kesbangpol Kota Mataram, Ketua FKUB dan 2 orang anggota, Kabid Wasnas Bakesbangpol Kota Mataram, dua orang utusan Polda NTB, Binmas Polres Mataram, Kapolsek Cakranegara, Binmas Mayura, Danramil Cakranegara, Babinsa Mayura, dan unsur Kominda Mataram. Pertemuan ini merumuskan hal-hal yang ditemukan pada proses sebelumnya, serta langkah ke depan. Disepakati, misalnya, membuat rumusan surat kesepakatan.

Keesokan harinya, Kamis, 4 Juli 2013, pukul 16.30 WITA, diadakan pertemuan Tim Penanganan Konflik guna membahas draf rencana "Surat Perjanjian Perdamaian" dan draft rancangan "Kesepakatan Bersama" antar warga kedua lingkungan Pandan Salas dan Tohpati. Rapat bertempat di lesehan Rumah Makan Gading, Sayang-Sayang. Jumlah peserta rapat 20 orang, terdiri atas: Sekretaris Rektor Univ. 45 Drs. H. Chasbah, Dekan FH Univ. 45 Mataram, Dekan Fisipol Universitas Mataram, Ka. Badan Kesbangpol, Camat Cakranegara, Kasi Binmas Polres Mataram beserta staf, Kapolsek Cakranegara, Danramil

Cakranegara, Sekretaris FKUB Mataram, seorang anggota FKUB Mataram, Lurah Cakra Utara, Kepala Lingkungan Tohpati, Lurah Mayura, Kepala Lingkungan Pandan Salas, Para intel dari Kominda Kota Mataram, dan beberapa staf camat dan kelurahan. Pertemuan ini menghasilkan draf rumusan Surat Perjanjian Damai dan Kesepakatan Bersama itu.

Keesokan harinya, Jumat, 5 Juli 2013, Pukul 16.00 WITA, Tim mengadakan Mediasi III bertempat di Bale Sangkep Universitas 45 Mataram. Mediasi kali ini mempertemukan kedua belah pihak penyebab pertikaian, yakni Sdr. Az, warga Pandan Salas beserta keluarga, dengan Sdr. Ida Bagus WA, warga lingkungan Tohpati, beserta keluarga, juga bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta masing-masing lurah dan kepala lingkungan kedua belah pihak. Pertemuan ini dimediasi oleh: Rektor Universitas 45 Mataram beserta pejabat kampus, Kaban Kesbangpol Mataram, Kasubdit Binmas Polda NTB beserta staf, Kasi Binmas Polres Mataram, Ketua FKUB Mataram beserta sekretaris, Kabid Wasbang Bakesbangpol Mataram, Camat Cakranegara, Babinsa Cakra Utara, dan para intel dari Kominda Mataram. Kedua pihak ditanya keinginan baiknya untuk berdamai, termasuk butir kesepakatan sebagaimana telah disusun drafnya. Setiap butir dibacakan dan dikoreksi bersama. Akhirnya, draf bisa diterima kedua belah pihak.

Pada Senin, 8 Juli 2013, pukul 16.30 WITA diadakanlah acara Penandatanganan "Surat Perjanjian Perdamaian" di Bale Sangkep Univ. 45 Mataram, antara pemuda yang bertikai, keluarga MA (orang tua sdr Az) dan keluarga ibu JW (orangtua Sdr Ida Bagus WA). Selain itu, ditandatangani pula "Kesepakatan

Bersama" antara warga lingkungan Pandan Salas Kelurahan Mayura dengan warga Lingkungan Tohpati Kelurahan Cakra Utara. Hadir sebagai saksi dalam penandatanganan ini antara lain: Walikota Mataram (diwakili Sekda Kota Mataram), Dandim 1606 Lobar, Kapolres Mataram, Rektor Universitas 45 Mataram beserta Civitas Akademik, Ka Dit Binmas dan Ka Dit Op Polda NTB, Kapolsek Cakranegara, Danramil Cakranegara, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda kedua belah pihak, Pimpinan SKPD, Ketua FKUB Kota Mataram, Camat Cakranegara, para Camat lainnya se-Kota Mataram, Lurah se-Kecamatan Cakranegara, intel Kominda, wartawan media cetak dan elektronik, serta para undangan yang mencapai sekitar 300 orang. Selain penandatanganan surat perjanjian juga dibacakan deklarasi/pernyataan sikap dari kedua belah pihak yang bertikai. Kasus kemudian dinyatakan ditutup.

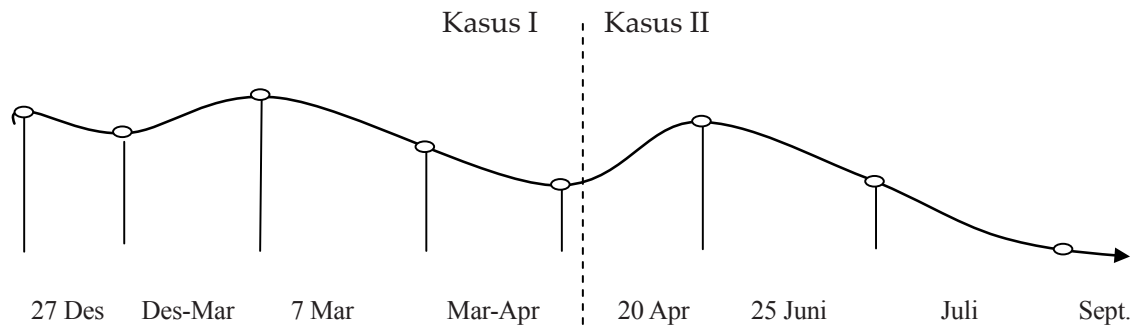
Selain langkah-langkah di atas, hingga penandatanganan, pemerintah setempat jugamelakukanbeberapa langkah sebagai bentuk *social recovery*. Langkah itu antara lain dengan pengerahan anak-anak mahasiswa untuk melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di daerah-daerah tersebut. Hal ini dilakukan oleh kampus Univ. 45 Mataram. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan segera dibangunnya Sekolah Dasar, sebagaimana aspirasi warga, serta bantuan ekonomi berupa pinjaman serta BMT. Selain itu, warga juga akan diberikan pembuatan akta kelahiran gratis, pemasangan lampu di gang-gang, serta pembuatan pos polisi di perempatan jalan sekitar lokasi. Yang terakhir ini telah berhasil diwujudkan, sedangkan yang lainnya masih dalam proses. Untuk memudahkan memahami alurnya, berikut bagan kronologis dua kasus ini:

Tabel 2

Kronologi Kasus I dan II serta Penanganannya

27 Des. 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus I (Tohpati-Karang Mas Mas) terjadi, 1 warga Kr. Mas Mas meninggal. • Malamnya Camat memerintahkan perdamaian
Des-Maret 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan antar kedua lingkungan kerap memanas. Bentrok berkali-kali terjadi. Upaya penyelesaian dilakukan, belum berhasil meredakan ketegangan/bentrok.
7 Maret 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagaimana beberapa malam sebelumnya, terjadi bentrok antarwarga. • Bentrok kali ini menewaskan 1 orang warga Tohpati.
Maret-April 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi <i>cooling down</i> suasana hubungan tegang antara lingkungan Kr. Mas Mas dan Tohpati. Upaya penanganan lebih mendapat jalan, ke arah kesepakatan damai. Terjadi tahap-demi-tahap mediasi ke arah rekonsiliasi.
20 April 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan "Surat perjanjian Perdamaian" antara kedua pihak keluarga dan penandatanganan "Kesepakatan Bersama" antara warga masyarakat Lingkungan Karang Mas Mas dan Lingkungan Tohpati.
25 Juni 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus bentrok kedua (antara Tohpati-Pandan Salas) terjadi jam 18.00 wita • Camat dan aparat langsung turun ke lapangan.
28 Juni '13 Pagi	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Khusus Terbatas oleh Walikota • Pembentukan Tim Penanganan dan Posko Tim di Universitas 45
28 Juni '13 Malam	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Tim Penanganan • Perumusan langkah-langkah Tim
1 Juli 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Mediasi I: Tim bertemu dengan warga Lingkungan Tohpati • Menyerap aspirasi dan mencari alternatif penyelesaian
3 Juli 2013 Pagi	<ul style="list-style-type: none"> • Mediasi II: Tim bertemu dengan warga Lingkungan Kr Mas Mas • Menyerap aspirasi dan mencari alternatif penyelesaian
3 Juli 2013 Malam	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Tim merumuskan hasil pertemuan dg 2 pihak • Diusulkan membuat "Kesepakatan Bersama"
4 Juli 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan Tim merumuskan naskah Kesepakatan.
5 Juli 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Mediasi III: Tim mengundang kedua pihak, mempertemukan dua aspirasi, dan mencermati rumusan kesepakatan.
8 Juli 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan "Surat Perjanjian Perdamaian" kedua pelaku dan keluarganya, dan, "Kesepakatan Bersama" antarwarga lingkungan Pandan Salas dan Tohpati.
s.d. 14 Sept. 2013 (saat penelitian dilakukan)	<p><i>Social recovery</i> yang sudah terlaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan mahasiswa KKN di lokasi 2. Pembuatan lampu penerangan di gang-gang kedua lingkungan 3. Bantuan ekonomi: BMT, bantuan usaha, dan sebagainya. 4. Pembuatan "Pos Polisi Penjagaan" di perempatan jalan kedua lingkungan. <p><i>Social recovery</i> yang belum terlaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana pembangunan SD di antara dua lingkungan. 2. Pemberian Akta Lahir gratis untuk kedua warga.

Jika digambarkan dalam fluktuasi (eskalasi-deeskalasi) kasus, sebagai berikut:



Merujuk pada teori resolusi konflik Christopher W. Moore di atas, beberapa bentuk dan tingkat intervensi konflik tampak dilakukan pada proses penanganan kasus ini. Tahap *peace making* dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat puncak eskalasi bentrok massa. Aparat menahan pelaku kekerasan dan menutup akses jalan. Kemudian, *peace keeping* juga oleh aparat agar pihak yang sudah tidak bertikai tidak kembali melakukan aksi kekerasan. Hal ini misalnya dengan blokade jalan dan pembuatan tembok pemisah. Lalu, *conflict management* mulai dilakukan dengan serangkaian langkah mediasi dan tahap lainnya oleh banyak pihak. Dalam kasus ini terlihat sejumlah pihak secara sinergis terus berperan. Mereka selalu hadir dalam terlibat dalam tahapan-tahapan tersebut. Adapun *peace building* yang merupakan proses peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur dan rekonsiliasi seluruh pihak bertikai, dilakukan dengan langkah *social recovery* berupa bantuan BMT dan Bansos, pembangunan penerangan jalan, dan rencana pembangunan sekolah tersebut.

Meski semua langkah penanganan ini bertepatan dengan bentuk dan tingkat intervensi konflik sebagaimana paparan teoritik di atas, tidak semua pihak yang terlibat (sebagaimana hasil wawancara) secara sadar mengetahui dan menyadari sedang mempraktikkan suatu teori resolusi konflik tertentu. Semua seolah

alamiah, mengalir bersama kepatutan yang semestinya sebagaimana mereka perkirakan.

Berhasilkah Perdamaian?

Jika ukurannya adalah berhentinya konflik, maka perdamaian kedua pihak dengan simbol adanya penandatanganan kesepakatan bersama tersebut di atas, telah menunjukkan keberhasilan proses penanganan ini. Konflik pun, hingga laporan ini ditulis, tidak terjadi lagi. Meski begitu, Camat Cakranegara sendiri enggan untuk menyatakan keberhasilannya dan tidak ingin terburu-buru menilai. Beliau ingin melihat setidaknya dalam dua tahun ke depan kondisi benar-benar damai. Dalam perkembangannya, evaluasi dan koordinasi terus dilakukan demi terus terciptanya kedamaian terkait kasus ini, juga menjaga agar di tempat lainnya tetap rukun.

Meski indikator keberhasilan penanganan konflik dapat diperdebatkan, setidaknya ada hal-hal faktual yang dapat menunjukkan keberhasilan itu, yakni:

1. Kondisi sudah membaik, tidak ada lagi bentrok fisik sebagaimana pernah terjadi.
2. Kepala Lingkungan di kedua pihak telah sejak awal berrangkul, dan berupaya menenangkan warganya. Upaya mengurangi masih adanya

prejudice dan aura pertentangan terus diupayakan melalui pengaruh kepala lingkungan dan tokoh masyarakat.

3. Warga di kedua lingkungan telah bersosialisasi lagi. Bahkan, beberapa anak warga Tohpati ada yang ikut sekolah sore (mengaji) di lingkungan Karang Mas Mas.
4. Kalangan anak muda dan warga pada umumnya tidak lagi cepat tersulut isu untuk melakukan tindakan-tindakan penyerangan dan lainnya. Mengenai hal ini, ada dugaan, sejak adanya korban jiwa di kedua pihak "*tension*" memang menurun, hal ini boleh jadi karena sudah merasa seimbang. Ketika ditelusuri apakah ada adat/kebiasaan menyeimbangkan korban – seperti berlaku pada lingkungan-lingkungan di Papua – ternyata di sini tidak berlaku. Hal itu nampaknya hanyalah semata kepuasan psikologis: impas/adil.
5. Kegiatan sosial ekonomi warga telah berjalan sebagaimana biasa, sebagaimana sebelum konflik dulu terjadi.

Menarik untuk dicatat, memperhatikan gambaran fluktuasi dua kasus ini, di mana terjadi eskalasi dan de-eskalasi konflik secara cepat, maka *judgement* keberhasilan memang masih harus diuji oleh waktu. Ketika pada 20 April 2013 terjadi kesepakatan damai dalam kasus antara warga Tohpati dan Karang Mas Mas, dan penanganan dinilai berhasil, ternyata dua bulan kemudian kasus hampir serupa juga terjadi di antara warga Tohpati dan Pandan Salas. Meski masih belum ditemukan keterkaitan tegas antara dua kasus ini – namun terdapat informan yang menegaskan bahwa kedua kasus berhubungan dengan Tohpati, sebagai pusat komunitas Hindu-Bali di Kota Mataram, dalam *enclave* yang tersegregasi secara tegas (Wawancara dengan Suprpto, 7 September 2013) – aura

pemicu dan penyebab yang hampir serupa, menjadikan kemungkinan meletusnya hal serupa di tempat lain perlu diwaspadai semua pihak.

Penjelasan mengenai penanganan konflik sebagaimana diuraikan di atas, didasarkan pada sejumlah sumber tertulis dan wawancara, secara kompilatif-komplementatif. Sumber tertulis didapat dari Kabangkesbangpolinmas dan Kepolisian. Sedangkan sumber lisan didapat dari wawancara dengan banyak pihak di kedua/ketiga pihak. Antara lain: Bondan, Kepala Badan Kesbangpolinmas Mataram (wawancara tgl. 5 September 2013), M. Chasbah (6 Sept. 2013), Sigit (Polres Mataram 6 Sept. 2013), Salman, Camat Cakranegara (10 Sept. 2013), Murad, Kepala Lingkungan Karang Mas Mas (11 Sept. 2013), Made Welken, Kepala Lingkungan Tohpati (12 Sept. 2013), dan FGD pada 13 Sept. 2013.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penanganan

Beberapa hal yang mendukung penanganan ini, sebagaimana dikatakan Camat Cakranegara dan beberapa anggota Tim (Catatan Forum FGD, 13 September 2013) adalah: (1) Adanya kebersamaan dan keikhlasan semua pihak untuk terlibat dalam proses penanganan. Hal ini terlihat dari keterlibatan yang terus menerus dalam setiap tahap penanganan di atas; (2) Peran pimpinan yang tegas, cepat, dan egaliter (turun ke lapangan) juga sangat menentukan keberhasilan proses penanganan; (3) Secara alamiah, semua warga pada dasarnya cenderung pada kondisi damai. Warga merasa capek dan terus khawatir ketika belum ada kesepakatan damai. Setelah ada komitmen bersama untuk damai dengan penandatanganan, semua pihak merasa nyaman dan saling menjaga perdamaian; (4) Adanya *local wisdoms* dan nilai-nilai lokal (*awig-awig*) yang bisa menjadi

bridging antar pihak bertikai; dan (5) Kerjasama pihak-pihak terkait, misalnya *provider* seluler, yang turut menciptakan kedamaian. Bahwa ketika banyak berseliweran SMS yang mengadu domba dan memprovokasi warga di kedua pihak, ada *provider* yang digaget penda untuk menyebarkan “informasi resmi” yang disebar kepada warga. Hal ini sangat membantu mengimbangi berita sesat, sekaligus pegangan informasi yang benar bagi warga.

Sedangkan faktor yang dinilai menghambat, antara lain: keterbatasan anggaran untuk operasional tahapan penanganan, efek buruk komunikasi dengan mudahnya tersebar isu sesat via SMS, adanya “provokator” dari luar wilayah, dan masih adanya *prejudice* sehingga masyarakat masih mudah cepat terpengaruh isu tertentu.

Penutup

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pendekatan penanganan konflik yang dipakai dalam kasus bentrok antar warga dengan nuansa agama ini adalah “akomodasi aspirasi dan kesepakatan/komitmen damai.” Tahapan yang dilakukan, secara berurut, sebagai berikut: (a) Mediasi I: temui dan serap aspirasi dari pihak A saja; (b) Mediasi II: temui dan serap aspirasi dari pihak B saja; (c) Mediasi III: pertemuan kedua pihak untuk menginfokan butir aspirasi kedua pihak; (d) Mediasi IV: susun rancangan “Surat Kesepakatan Bersama”; (e) Mediasi

V: pertemuan elit kedua pihak, dan bicarakan konsep kesepakatan; dan (f) Penandatanganan “Surat Kesepakatan Bersama”, dan pengawalan komitmen tersebut.

Penanganan konflik melalui pendekatan tersebut menunjukkan keberhasilan dengan indikator antara lain tidak ada lagi *open conflict*, masyarakat mulai berinteraksi, berbaur, dan kehidupan sosial-ekonomi telah kembali berjalan seperti semula. Dalam hal interaksi yang harmonis di antara masyarakat, tembok pemisah di antara lingkungan Karang Masmam dan Tohpati, fungsional pada masa konflik untuk membatasi pertentangan. Meskipun demikian, “Tembok Berlin” tersebut secara praktis mempersulit kedua pihak untuk berbaur dan secara simbolik mempertegas adanya segregasi dan kesan pertentangan.

Faktor-faktor yang pendukung penanganan konflik ini adalah adanya kebersamaan semua pihak dalam proses penanganan, pemimpin yang peka, tegas, dan bersedia “turun” ke lapangan, serta dukungan *local wisdoms*, dan keinginan damai dalam masyarakat. Sedangkan faktor penghambat antara lain terbatasnya anggaran *contingency* bagi konflik, provokasi luar via SMS dan media lainnya, serta masih adanya prejudis dalam kelompok. Dalam jangka panjang, upaya *social recovery* pemerintah yang belum direalisasikan seperti pembangunan SD dan ruang publik terbuka dapat menjadi hambatan penanganan konflik.

Daftar Pustaka

- Asry, Yusuf, dkk. *Masyarakat Membangun Harmoni: Resolusi Konflik dan Bina Damai di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
- Fauzi, Ihsan Ali, dkk. “Pola-Pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008).” YPW-MPRK UGM-TAF, 2009.

- Israil, dkk. "Dinamika Pluralisme Agama di Nusa Tenggara Barat," dalam *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 1, No. 1, Desember 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Moore, Christopher W. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, 2nd Ed.* San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996.
- Mudzhar, Atho. *Merayakan Kebhinnekaan Membangun Kerukunan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2013.
- Muslim, Sriibanun. *Islam Pulau di Lombok Kajian Historis tentang Perkembangan Islam di Lombok*. Laporan Penelitian. STAIN Mataram. 1999.
- Slide paparan Walikota Mataram pada Pertemuan Terbatas dengan Wantimpres terkait Model Penanganan Konflik Sosial Berlatar Belakang Agama di Kota Mataram, 26 Juli 2013.
- Soeprapto. "Islam-Hindu di Lombok," Disertasi UIN Jakarta, 2013.
- Taher, Elza Peldi, ed. *Merayakan Kebebasan Beragama: Bungai Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: ICRP dan Kompas, 2009.
- Tim Penyusun. *Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Depdikbud RI, 1977.

Dokumen

Naskah Surat Perjanjian Perdamaian

Naskah Kesepakatan Bersama